

Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Tematik di Kota Sukabumi

Adinda Raya Marsela*, Rizki Hegia Sampurna, Dine Meigawati

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*adindaraya@ummi.ac.id

Abstract

The growth of population and infrastructure development in urban areas, including Sukabumi City, has increased the urgency of providing green open spaces (GOS) as a crucial element in maintaining ecological balance and improving the quality of life for residents. The Sukabumi City Government has established thematic parks as part of public GOS to fulfill social, recreational, and aesthetic needs. However, the effectiveness of their management and utilization still faces several challenges. This study aims to analyze the effectiveness of the management and utilization of thematic parks in Sukabumi City using the effectiveness theory of (Nakamura and Smallwood, 1980), which includes five dimensions: goal achievement, efficiency, target group satisfaction, client responsiveness, and maintenance systems. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants consisted of representatives from the Public Works and Spatial Planning Office (DPUTR) and local park users. The results indicate that the management of thematic parks in Sukabumi City is not yet fully effective. Several parks are not being utilized in accordance with their designated themes, and even misuse occurs, such as immoral activities and alcohol consumption, reflecting weak supervision. In terms of efficiency, budget constraints are the main obstacle to proper maintenance and facility provision. Although some parks are used quite well, overall public satisfaction remains suboptimal. In conclusion, the management and utilization of thematic parks in Sukabumi City have not been entirely effective. Improved coordination, supervision, public education, and adequate budget allocation are needed to ensure that the parks function according to their intended purposes.

Keywords: Public Green Space; Thematic Park; Effectiveness; Sukabumi City

Abstrak

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur di kota-kota, termasuk Kota Sukabumi, meningkatkan urgensi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Sukabumi telah menyediakan taman tematik sebagai bagian dari RTH publik untuk memenuhi kebutuhan sosial, rekreasi, dan estetika kota. Namun, efektivitas pengelolaan dan pemanfaatannya masih menyisakan berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi menggunakan teori efektivitas dari (Nakamura dan Smallwood, 1980) yang mencakup lima dimensi: pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, dan sistem pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta masyarakat pengguna taman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman tematik di Kota Sukabumi belum sepenuhnya efektif. Beberapa taman tidak dimanfaatkan sesuai temanya, bahkan terjadi penyalahgunaan seperti tindakan asusila dan

sebagai tempat bermabuk-mabukan, yang menandakan lemahnya pengawasan. Dari sisi efisiensi, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pemeliharaan dan pengadaan fasilitas. Meskipun terdapat taman yang dimanfaatkan cukup baik, secara umum kepuasan masyarakat belum optimal. Simpulannya, pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi belum efektif secara menyeluruh. Diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, edukasi masyarakat, serta alokasi anggaran yang memadai agar taman dapat berfungsi sesuai tujuan awal.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau; Taman Tematik; Efektivitas; Sukabumi

Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang pesat, kebutuhan akan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi semakin mendesak di Indonesia terutama di kota-kota yang cukup besar. Agar perkotaan dapat stabil dengan kenyamanan lingkungan dan udara, serta dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir. Maka dari itu pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai elemen pendukung kehidupan di perkotaan yang mampu menghasilkan O₂ bagi masyarakat sebagai paru-paru kota. Penyelenggaraan RTH kota bertujuan untuk menjaga keselarasan, dan keseimbangan wilayah kota, serta berperan penting dalam menciptakan keseimbangan ekosistem perkotaan, memberikan ruang untuk aktivitas rekreasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Taman kota merupakan bentuk dari RTH Publik yang tentunya dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Konsep ruang publik sangat penting dalam kehidupan perkotaan karena memiliki peran dalam menciptakan interaksi sosial, dapat menjadi sebuah ruang konektivitas antara masyarakat sehingga mempersatukan antar individu, dan membangun identitas bersama, juga dapat menjadi tempat bertukar pikiran dan mencari ide-ide.

Sangat disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah kota tampaknya masih kurang memperhatikan keberadaan taman kota. Padahal, taman dalam suatu kota memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kesehatan masyarakat, baik secara fisik maupun psikologis. Saat ini, penggunaan taman kota di Kota Bandung cenderung menyimpang dari fungsi aslinya. Hal ini terlihat dari perubahan aktivitas di dalam taman yang mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan taman kota sebagai elemen penyeimbang kehidupan perkotaan. Padahal taman kota memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti, pendidikan masyarakat, katup pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat, pembentuk citra dan *image* kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat.

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 29 dijelaskan bahwa RTH di sebuah kota terdiri dari dua jenis yaitu Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat. RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas. Sebuah wilayah kota dipersyaratkan memiliki RTH dengan proporsi minimum 30% dari luas wilayahnya, yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%.

Tercantum pula dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 mengatur tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Untuk membuat taman kota menjadi suatu taman yang menarik dan juga bisa mendapatkan banyak perhatian lebih dari masyarakat, maka dibuatlah taman kota tersebut menjadi taman tematik. Yang mana taman tematik merupakan bagian dari taman kota biasanya memiliki nama-nama yang unik, konsep tematik itu adalah agar ada perbedaan antara taman satu dan taman lainnya, serta memiliki keunikan sendiri. Selain unik tentu harus memiliki sarana dan prasarana yang baik, taman tematik juga harus memiliki fasilitas yang lengkap agar kenyamanan dan kebutuhan pengunjung bisa terpenuhi. Dikarenakan taman kota dan taman tematik merupakan suatu hal yang sama, maka fungsi dari keduanya pun sama yang mana antara lain sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti, pendidikan masyarakat, katup pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat, pembentuk citra dan *image* kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah penduduk kota Sukabumi pada tahun 2023 sebanyak 360,64 jiwa, yang mana Kota Sukabumi tergolong dalam tingkat penduduk sedang. Maka dengan keberadaan ruang publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif serta berkelanjutan di Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan kebijakan untuk menyediakan dan mengelola ruang terbuka hijau guna mencapai berbagai tujuan lingkungan dan sosial.

Penyediaan RTH di Kota Sukabumi memiliki peran penting dalam mengelola dampak banjir, terutama di tengah fenomena cuaca ekstrem yang menyebabkan intensitas curah hujan tinggi. Sebagaimana seperti yang terjadi di Sukabumi saat ini, Sukabumi tengah dilanda banjir yang dipicu oleh hujan ekstrem yang menyebabkan saluran air tersumbat terutama oleh sampah, dan faktor lainnya yaitu karena penyediaan RTH di Kota Sukabumi masih belum terpenuhi selayaknya seperti dalam kebijakan yang ada, sehingga potensi terjadinya genangan air dan banjir meningkat cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya kurangnya RTH yang berfungsi, tetapi juga perlunya pengelolaan lingkungan yang baik untuk mencegah banjir.

Taman tematik di Kota Sukabumi dibuat pada tahun 2014-2015 secara beriringan, saat itu pada masa jabatan Bapak H. Mohammad Muraz selaku Walikota Kota Sukabumi periode 2013-2018. Taman tematik sengaja dirancang untuk kepentingan masyarakat kota yang mana taman tematik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat, baik itu dari segi fisik maupun psikologis. Kota Sukabumi, dengan perkembangan infrastrukturnya, memiliki beberapa taman kota yang menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal. Namun, keberhasilan taman kota sebagai ruang publik tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung yang datang, tetapi juga dari bagaimana taman tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penamaan taman-taman tersebut tentu memiliki arti serta sesuai dengan fungsinya. Tema yang diberikan pada taman layaknya tema yang digunakan dalam sebuah cerita, tema berfungsi sebagai acuan dalam mengolah ruang terbuka yang ditampilkan lewat setting fisik taman. Fisik taman yang hadir melalui fasilitas turut mempengaruhi aktivitas yang terjadi didalam taman, dimana aktivitas mengarah pada tema yang diberikan pada taman tersebut. Seperti halnya taman-taman di Kota Sukabumi.

Berdasarkan tabel 1 di bawah ini terdapat 5 taman kota yang merupakan taman tematik, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Taman Tematik di Kota Sukabumi

No	Taman Tematik	Luasan
a	Taman Nobar	458 m ²
b	Taman Urang	485 m ²
c	Taman Aspirasi	118 m ²
d	Taman Cikondang	6.200 m ²
e	Taman Sugema	3.800 m ²
Jumlah		11.061 m ²

(Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2024)

Berdasarkan penamaan dari setiap taman-taman yang ada tentu tema taman tersebut selaras dengan fungsinya, yang mana:

1. Taman nobar diperuntukan untuk nonton bareng maka tersedia tribun untuk duduk dan juga tembok polos untuk nonton, siapapun dapat melakukan nonton bareng di taman tersebut tanpa di pungut biaya, dengan ketentuan harus menjaga kebersihan taman.
2. Taman urang, mengapa di namai taman urang karena taman tersebut dapat digunakan untuk kita semua dan di gunakan ramai-ramai oleh kita bersama sehingga taman urang menjadi taman urang sarerea, dengan fasilitas-fasilitas yang ada seperti untuk belorahraga, membaca, dan berkarya.
3. Taman aspirasi sesuai dengan penamaannya taman ini dibuat untuk dapat digunakan masyarakat kota dalam mencari inspirasi maupun ide-ide dengan ruang lingkup yang hijau-hijau dan taman aspirasi menyediakan kotak aspirasi agar masyarakat dapat menyalurkan aspiranya yang dapat menjadi saran-saran atau masukan serta motivasi bagi para *Stakeholder* untuk Sukabumi yang lebih maju.
4. Taman Cikondang berceritakan bahwa dulunya merupakan bekas lahan terminal cikondang yang menjadi kosong, sehingga dibuatkanlah taman yang diberi nama taman cikondang karena ingin di kondangkan. Bentuk dari taman cikondang yaitu amfiteater, karena sebetulnya fungsi taman cikondang itu diperuntukkan untuk konser maka dari itu di sediakan stagenya.
5. Taman sugema di buat untuk dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, dalam bahasa sundanya yaitu untuk menyugemakan masyarakat yang mana di dalamnya tersedia fasilitas untuk bersketboard, lapangan futsal, bersepedah (khususnya BMX) untuk meraimaikan kegiatan di taman tersebut. Dibalik itu taman sugema juga terinspirasi karena di Kota Sukabumi ini belum ada tempat masyarakat mengekspresikan hobbynya terlebih pada olahraga-olahraga yang menantang, padahal peminatnya itu cukup banyak.

Pada pemanfaatan taman-taman tersebut dapat di katakan masih belum seimbang, masih terjadi penyalahgunaan fungsi taman oleh masyarakat sehingga dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan negatif, akibat kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait (*Stakeholder*). Tarcantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi nomor 2 tahun 2015, tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Yang di dalamnya membahas terkait tujuan RTH, fungsi RTH, manfaat RTH, serta segala hal yang berkaitan dengan RTH di Kota Sukabumi. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah, adapun beberapa masalah yang terjadi diantaranya yaitu : Pertama, kurangnya pengawasan dari para pihak-pihak terkait sehinggakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan taman masih kurang baik, yang menyebabkan taman tersebut menjadi tempat yang negatif dan tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Hal ini kembali lagi kepada masyarakat,

karena kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat akan fungsi dari taman yang sesungguhnya. Padahal fasilitas taman sudah di sediakan secara gratis oleh pemerintah. Adapun contoh kasus taman yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu pada Taman Sugema, Cikondang Sukabumi.



Gambar 1. Penutupan Akses Jalan Taman Sugema
(Sumber : Detik Jabar, 2022)

Taman Sugema sekaligus akses jalan menuju taman tersebut ditutup, penutupan Jalan Taman Sugema dilakukan oleh unsur pemerintah kecamatan dan Polsek Citamiang Resor Sukabumi Kota. Jalan yang menghubungkan ke Kampung Lamping itu ditutup menggunakan bambu dan diikat tali. Pada siang hari ini, tidak terlihat aktivitas apapun. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran terdapat beberapa sampah botol minuman keras, rokok abu-abu hingga alat kontrasepsi. Penutupan Taman Sugema ini sudah disepakati oleh warga masyarakat, pihak kecamatan, Dinas PU dan DLH. Taman tersebut ditutup karena sudah tidak dimanfaatkan lagi sebagaimana mestinya. Kapolsek Citamiang beberapa kali menangkap oknum yang melakukan tindakan asusila, bahkan tawuran antar sekolah dan sering terjadi tindak pidana kekerasan atau (pencurian berkedok) hipnotis.

Hal serupa juga terjadi pada Taman Nobar, sebagaimana fungsi dari Taman Nobar dikaji ulang sebab dalam penyediaan taman tersebut terjadi kekacauan dan penyalahgunaan fungsi taman.



Gambar 1. Taman Nobar
(Sumber : Radar Sukabumi, 2019)

Taman ini sebelumnya difungsikan menjadi wadah bagi komunitas untuk menyelenggarakan acara yang bermanfaat sembari menonton film, namun sangat disayangkan bahwa taman tersebut malah dijadikan tempat yang negatif. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi mengatakan bahwa, fungsi taman nobar sendiri untuk sementara waktu divakumkan sampai waktu yang belum ditentukan. “Ada hal terjadi tahun lalu, yang dilakukan oknum sebuah komunitas bola sampai

mengakibatkan keributan karena membawa senjata tajam dan minuman keras.” Pedagang setempat pun mengaku bahwa, “Banyak yang pacaran kalau malam karena sudah lama tidak ada kegiatan yang dilakukan warga seperti nonton bareng seperti dulu,”

Kedua, keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan atau pengelolaan RTH. Selaras dengan yang diucapkan oleh Kepala Seksi Pertamanan DPUTR Kota Sukabumi. “Dengan keterbatasan anggaran yang ada, saat ini DPUTR sementara waktu hanya bisa melakukan pemeliharaan rutin. Semisal, memotong rumput yang tumbuh liar di sekitar pertamanan. Karena anggaran pada tahun ini sangat terbatas, sehingga kami hanya bisa melakukan pemeliharaan rutin. Untuk perbaikan fasilitas mungkin nanti di tahun yang akan datang.”

Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga, melestarikan dan membudidayakan taman dengan sebaik-baiknya. Menurut Kepala Seksi Pertamanan, sejauh ini kesadaran masyarakat dalam menjaga taman masih minim terbukti masih banyak orang tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang ada maupun melakukan hal tidak terpuji lainnya yang mengakibatkan taman rusak. “Karena Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas, untuk keindahan, keasrian dan kebersihan, mari jaga bersama demi Sukabumi indah.”

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu ruang terbuka hijau dan taman kota dari berbagai sudut pandang. (Rahmad Sadli et al., 2021) meneliti pemanfaatan taman kota di Tarakan dengan fokus pada aksesibilitas, fasilitas, dan fungsi ruang publik. Sementara itu, (Novela et al., 2021) menilai efektivitas taman tematik di Kota Bandung, namun hanya membahas dua dimensi, yaitu efisiensi dan respon pengguna, tanpa mengulas aspek lain dari efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian (Ilman Syahrial et al., 2023) berfokus pada evaluasi kebijakan penyediaan RTH di Sukabumi secara umum, tanpa membahas secara spesifik efektivitas pengelolaan taman tematik. Penelitian (Gemiarty Puteri et al., 2021) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan antara kebijakan penataan RTH dan kepuasan publik, namun belum menyentuh aspek kualitatif yang mendalam terkait pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik. Dari studi-studi tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi dengan menggunakan kerangka teori dari Nakamura dan Smallwood (khususnya di Kota Sukabumi) yang mencakup lima dimensi: pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, dan sistem pemeliharaan. Selain itu, isu-isu aktual seperti penyalahgunaan fungsi taman, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan anggaran belum banyak diangkat dalam konteks lokal Sukabumi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi kekosongan kajian, sekaligus memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam upaya mewujudkan pengelolaan taman tematik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Di Kota Bandung, (Maryani et al., 2023) dalam Jurnal Geografi Gea mengamati bahwa taman tematik mampu menjadi magnet sosial bagi warga tidak hanya sebagai ruang rekreasi tetapi juga sarana identitas dan kebudayaan namun desain fasilitas dan nama taman perlu disesuaikan agar sesuai preferensi publik. Kondisi ini sejalan dengan temuan preliminer pada penelitian ini, bahwa desain tema taman mempengaruhi pemanfaatan publik. Selain itu, berdasarkan (Ristianti et al., 2024) menekankan bahwa interior taman dengan *desain biophilic* yang baik menyatukan elemen alam ke dalam ruang publik perkotaan dapat menurunkan temperatur permukaan dan meningkatkan kesehatan mental serta fisik pengguna secara signifikan. Bila taman tematik di Sukabumi mengadopsi konsep tersebut, potensi manfaat ekologis dan kesejahteraan masyarakat akan lebih maksimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis atau normatif (UU No. 26/2007 dan Permen ATR/BPN 14/2022 sesuai proporsi RTH

minimum), tetapi juga sesuai dengan tren ilmiah terbaru yang menekankan pentingnya RTH multifungsi sebagai solusi ekologis, sosial, kesehatan, dan mitigasi bencana di perkotaan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini diarahkan pada efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) publik. Bertolak dari fokus tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi, dengan mengacu pada lima dimensi efektivitas implementasi kebijakan menurut (Nakamura dan Smallwood, 1980) yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, dan sistem pemeliharaan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu administrasi publik, khususnya pada aspek implementasi kebijakan publik terkait pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi dan masyarakat umum dalam mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik secara berkelanjutan dan sesuai fungsi perencanaan awalnya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini menjadi strategi utama bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi dan mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dalam metode ini bersifat naratif, sehingga dapat menggambarkan secara mendalam isu atau permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya serta informasi yang mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, khususnya bidang pertamanan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengembangan serta keberlanjutan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut. Teknik pemilihan informan menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *snowball sampling*. Dalam pelaksanaannya, peneliti terlebih dahulu memilih satu atau dua orang informan utama. Apabila informasi yang diperoleh dari informan awal dianggap belum mencukupi, maka peneliti akan menelusuri informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai langkah validasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada tahap ini peneliti membahas terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan mendeskripsikan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan dengan model efektivitas implementasi oleh (Nakamura & Smalwood, 1980) yang memiliki 5 dimensi, antara lain:

1. Pencapaian Tujuan
2. Efisiensi

3. Kepuasan Kelompok Sasaran
4. Daya Tanggap Klien
5. Sistem Pemeliharaan.

Efektivitas menilai apakah hasil yang dicapai sesuai atau mendekati target yang diinginkan. Dalam konteks implementasi kebijakan atau program publik (seperti taman tematik), efektivitas tidak hanya dilihat dari keberadaan fisik taman, tetapi juga dari bagaimana taman tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awal pembuatannya. Jika taman dirancang untuk mendorong interaksi sosial dan kegiatan komunitas, maka taman dikatakan efektif apabila pengunjung menggunakannya sesuai dengan fungsi tersebut.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat dilihat dari keberhasilan seseorang atau organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebagai target. Ini menunjukkan tingkat efektivitas usaha dan strategi yang digunakan untuk sampai ke titik tersebut. Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh (Nakamura dan Smallwood, 1980), pencapaian tujuan didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan dirancang untuk menghasilkan hasil yang terukur dan nyata. Oleh karena itu, tujuan utama dari jenis evaluasi ini adalah untuk menentukan apakah para pelaksana telah mencapai hasil yang ditetapkan dalam mandat kebijakan atau tidak.

Di Kota Sukabumi, keberadaan taman tematik tidak hanya dimaksudkan sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial, edukasi lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat urban. Oleh karena itu, pencapaian tujuan taman tematik harus mencerminkan sejauh mana fungsi-fungsi tersebut berhasil diwujudkan melalui pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). DPUTR Kota Sukabumi telah menunjukkan upaya untuk memenuhi tujuan utama pembangunan taman tematik, yaitu menyediakan ruang publik yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai fasilitas dasar seperti area duduk, taman bermain anak, elemen edukatif, serta aksesibilitas yang cukup baik.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dari ketersediaan taman tematik di Kota Sukabumi ini, maka di lihat dari presentase tujuan program yang tercapai, kesesuaian hasil dengan rencana strategi, serta dampak program terhadap kelompok sasaran, maka dilakukan penelitian secara mendalam melalui wawancara bersama beberapa informan. Berdasarkan dimensi pencapaian tujuan sebagaimana dikemukakan oleh (Nakamura dan Smallwood, 1980), taman tematik di Kota Sukabumi menunjukkan keberhasilan pada tahap perencanaan dan pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi sebagai pihak pengelola telah merancang taman-taman tersebut dengan konsep tematik yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang pertamanan “Seperti taman nobar khusus untuk melakukan kegiatan nonton bareng, , taman aspirasi memang konsepnya untuk ngobrol santai bertukar ide dan aspirasi sehingga posisi kursinya pun berhadap-hadapan, taman cikondang di desain untuk pertunjukan dan aksi pentas seni karena bentuknya juga sudah *amphitheater*, taman sugema memang di desain anak-anak pecinta olahraga ekstrim.” Desain fisik dari taman-taman tersebut mencerminkan tema dan fungsi sosial yang ingin dicapai, yang menunjukkan bahwa tujuan program telah terintegrasi secara baik dalam tahap perencanaan.

Namun demikian, efektivitas implementasi dan pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya upaya konkret dari pihak pengelola untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat mengenai fungsi dan tujuan masing-masing taman sesuai dengan tema yang telah

dirancang. Akibatnya, banyak taman tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal pembangunannya. Hal tersebut selaras dengan ungkapan masyarakat selaku penerima manfaat “Namun untuk pencapaian tujuan dari masing-masing taman sepertinya belum optimal karena pada implementasi penggunaan taman tidak sesuai temanya.” Meskipun taman-taman tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat duduk, area bermain anak, dan elemen edukatif, pemanfaatannya belum optimal. Lebih lanjut informasi dari beberapa informan menyebutkan bahwa “Pada awalnya taman-taman tersebut memang digunakan sesuai fungsinya, tetapi seiring berjalannya waktu terjadi penurunan aktivitas dan penyimpangan fungsi. Beberapa taman bahkan tampak terbengkalai, jarang dikunjungi, atau menjadi lokasi aktivitas negatif seperti tawuran dan penyalahgunaan oleh kelompok remaja.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian dalam bentuk *output* dan *outcome* dari pembangunan taman tematik masih bersifat parsial. Dampak positif yang diharapkan seperti meningkatnya interaksi sosial, tumbuhnya partisipasi masyarakat, dan tersedianya ruang publik yang sehat belum sepenuhnya tercapai dan tidak terwujud secara berkelanjutan. Meskipun beberapa masyarakat mengaku merasakan manfaat dari keberadaan taman seperti tempat bersantai, terapi pijat kaki, dan ruang membaca ketidaksesuaian antara pemanfaatan aktual dengan tema taman menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pasca pembangunan.

Masalah ini diperburuk oleh kurangnya upaya pemeliharaan, minimnya pengawasan, serta tidak adanya program aktivasi rutin yang dapat menghidupkan kembali fungsi taman sesuai tema. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik oleh DPUTR belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap awal perencanaan program.

2. Efisiensi

Sebagaimana merujuk pada teori dari (Nakamura dan Smallwood, 1980) terkait dimensi efisiensi yakni memberikan penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan saja berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program, waktu pelaksanaan, dan sumberdaya yang digunakan. Dengan demikian suatu program dapat dikatakan terimplementasi dengan baik apabila terdapat perbandingan terbaik atau kualitas program dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Dalam konteks pengelolaan taman tematik di Kota Sukabumi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), efisiensi dapat dilihat dari bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan taman dilakukan dengan meminimalkan pemborosan tanpa mengurangi kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Suatu program dikatakan efisien apabila hasil yang diperoleh sebanding atau bahkan lebih besar dari input yang dikeluarkan, baik dalam hal biaya maupun waktu pelaksanaan. Misalnya, taman yang dibangun tepat waktu, dengan anggaran yang proporsional, fasilitas yang lengkap, serta dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Sebaliknya, apabila taman dibangun dengan biaya besar namun cepat rusak, minim pengunjung, atau pengelolaannya tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, maka hal tersebut mencerminkan rendahnya efisiensi program. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya berbicara soal penghematan, tetapi lebih menekankan pada ketepatan dalam penggunaan sumber daya untuk menghasilkan manfaat publik yang sebesar-besarnya.

Dalam mengukur tingkat efisiensi pada efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik, maka dapat dilihat berdasarkan pemanfaatan anggaran secara optimal, Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, dan Analisis biaya-manfaat. Dimensi

efisiensi dalam konteks efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi merujuk pada sejauh mana sumber daya yang digunakan, baik berupa anggaran, waktu, tenaga kerja, maupun sarana prasarana, mampu menghasilkan manfaat yang sepadan atau lebih besar. Berdasarkan teori Nakamura dan Smallwood (1980), efisiensi tidak hanya terkait dengan penghematan biaya, tetapi juga dengan kualitas pelaksanaan program dan ketepatan penggunaan sumber daya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta per tahun untuk pemeliharaan taman, serta tambahan Rp200 juta untuk kebutuhan seperti tambal sulam tanaman. Penggunaan anggaran ini mencakup pembelian bahan bakar, perlengkapan petugas, serta operasional fasilitas pendukung. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun anggaran digunakan secara efisien menurut pengelola, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas dan belum maksimalnya proses pemeliharaan, terutama dalam menjaga kebersihan dan keteraturan taman.

Pengukuran efisiensi juga dilakukan melalui analisis biaya-manfaat. Kepala bidang pertamanan DPUTR Kota Sukabumi menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran dicatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), dan manfaatnya dinilai berdasarkan jumlah pengunjung, kepuasan masyarakat, serta kontribusi taman terhadap kualitas lingkungan.” Namun, transparansi terhadap laporan ini belum menyeluruh, karena sebagian besar staf dan masyarakat tidak mengetahui rincian anggaran maupun penggunaannya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek akuntabilitas publik yang dapat memengaruhi persepsi efisiensi di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat merasa manfaat taman belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan, mengingat masih banyak fasilitas yang rusak, tidak digunakan secara maksimal, atau bahkan tidak sesuai dengan tema taman. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara input dan output dalam pelaksanaan program.

Di sisi lain, keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat efisiensi. Terdapat 78 titik ruang terbuka hijau (RTH) yang harus dikelola oleh hanya 58 petugas, sehingga pelaksanaan tugas seperti pemeliharaan taman, pengelolaan sampah, dan perbaikan fasilitas tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini diperparah dengan minimnya keberadaan petugas di lokasi, sebagaimana ditemui dalam observasi lapangan yang menunjukkan tidak adanya petugas saat waktu operasional. Kurangnya jumlah tenaga kerja juga berdampak pada ketidakteraturan penataan taman dan berkurangnya kenyamanan pengunjung. Informasi dari masyarakat pun menyatakan bahwa terkait hal tersebut “Sebagian taman tematik ada yang bisa di katakan sebanding dengansumber daya yang dikeluarkan karena masih ramai dan terasa hidup, namun untuk taman sugema dan taman aspirasi saya rasa sudah sepi pengunjung, sehingga pada implementasi pemanfaatannya tidak efektif.”

Meskipun demikian, tidak semua taman menunjukkan ketidakefisienan. Beberapa taman yang berada di pusat kota dan dekat dengan aktivitas publik masih menunjukkan tingkat kunjungan yang tinggi, serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi juga sangat dipengaruhi oleh lokasi, aksesibilitas, dan daya tarik fasilitas yang tersedia. Ketika taman memiliki fasilitas yang sesuai dengan tema, bersih, dan terawat, maka manfaat yang dirasakan masyarakat akan sebanding bahkan melebihi biaya yang telah dikeluarkan.

Secara keseluruhan, efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi belum tercapai secara optimal. Masih terdapat ketimpangan antara input berupa anggaran dan tenaga kerja dengan *output* yang dihasilkan, terutama dari sisi kualitas fasilitas, kebersihan taman, dan tingkat pemanfaatan oleh masyarakat. Oleh

karena itu, diperlukan perbaikan dalam distribusi sumber daya manusia, peningkatan transparansi anggaran, serta evaluasi terhadap fasilitas yang benar-benar dibutuhkan agar pengelolaan taman dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat publik secara maksimal.

3. Kepuasan Kelompok Sasaran

Dimensi Kepuasan Kelompok Sasaran yang dikemukakan oleh (Nakamura dan Smallwood, 1980) merupakan dimensi penting dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu program. Dalam perspektif mereka kepuasan kelompok sasaran merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ukuran yang digunakan adalah tingkat kepuasan, namun mekanisme yang menyebabkan kebijakan tersebut dapat memberikan kepuasan tidak diperiksa secara eksplisit. Sebagai gantinya, efektivitas kebijakan dinilai berdasarkan persepsi populasi yang relevan. Berdasarkan kriteria ini, evaluator mengikuti arahan pembuat kebijakan dan menilai kepuasan konstituen sebagai indikator yang relevan dalam menentukan keberhasilan kinerja kebijakan.

Kepuasan kelompok sasaran juga merupakan cerminan langsung dari keberhasilan atau kegagalan suatu taman tematik dalam memberikan manfaat nyata. Pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif akan berujung pada kepuasan tinggi, sementara ketidakefisienan akan menghambat peran taman sebagai ruang publik yang inklusif dan fungsional. Kepuasan kelompok sasaran dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana taman-taman tersebut memenuhi fungsi sosial, estetika, dan fungsional bagi masyarakat. Kelompok sasaran yang dimaksud dapat mencakup warga sekitar, pengguna harian seperti anak-anak, orang tua, remaja, komunitas olahraga, hingga wisatawan lokal.

Kepuasan mereka biasanya diukur melalui Tingkat kepuasan pengguna dan Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kenyamanan, keamanan, kelengkapan fasilitas, kebersihan, kemudahan akses, serta kesesuaian taman dengan kebutuhan dan harapan mereka. Tingkat kepuasan ini sangat terkait erat dengan efektivitas pengelolaan. Ketika taman dikelola secara optimal dengan SDM yang memadai, anggaran yang tepat guna, dan perawatan rutin maka fasilitas akan terjaga, suasana nyaman akan tercipta, dan rasa aman akan meningkat. Sebaliknya, jika pengelolaan berjalan kurang efektif, maka kondisi fisik taman yang kotor, tidak terawat, atau tidak aman akan berdampak langsung pada penurunan kepuasan pengunjung.

Dalam menilai efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi, dimensi kepuasan kelompok sasaran menjadi indikator penting. Merujuk pada teori Nakamura dan Smallwood (1980), kepuasan kelompok sasaran merupakan cerminan langsung dari keberhasilan kebijakan publik berdasarkan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap taman tematik di Kota Sukabumi masih bervariasi, tergantung pada kondisi fisik, ketersediaan fasilitas, dan kualitas pengelolaan di masing-masing taman. Kelompok sasaran yang dimaksud dalam konteks ini mencakup masyarakat umum, pengunjung harian seperti anak-anak, orang tua, remaja, komunitas olahraga, hingga wisatawan lokal.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar informan mengenai mekanisme pengukuran kepuasan. Informan 1 (Kepala bidang) menyebutkan bahwa “Untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap taman itu kita tentu membutuhkan kuisioner namun kita itu melakukannya harus melalui konsultan, akan tetapi karena dari masyarakatnya mendapat respon yang positif sehingga jika di sosial media itu ada beberapa *hashtag* yang bisa dilihat bahwa taman-taman di kota sukabumi ini

sudah bagus dan ada monitoring dari pemerintah kota dan pusat, karena kota sukabumi ini sudah WTP yang mana pemerintahannya itu terbebas dari korupsi dan itu berturut-turut selama 13 kali, selain itu juga kita sudah mendapat beberapa penghargaan terkait taman, yang mana itu menjadi salah satu tolak ukur.” Namun, informan 2 (*staff*) menjelaskan bahwa “Mengukur kepuasan masyarakat itu melalui google form yang di tujukan untuk pengunjung taman dengan mencantumkan keluhan mereka bagaimana, tingkat kenyamanannya bagaimana, penataan dan fasilitasnya bagaimana. Selain itu juga adanya masukan-masukan secara langsung dari masyarakat.” Hal ini mencerminkan belum adanya sistem evaluasi yang terkoordinasi dan terstandarisasi dalam mengukur kepuasan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum, kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas fasilitas dan perawatan taman. Sebagian besar informan menyoroti minimnya fasilitas dasar seperti wc umum dan area parkir, serta kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas yang sudah ada, hal tersebut selaras dengan ungkapan informan 5 yang menyatakan “Saya sendiri merasa kurang puas, karena tidak ada lahan parkir khusus, serta tidak tersedia wc umum, terlebih di taman aspirasi ini mungkin kursinya perlu di perbaharui dan taman dibuat lebih menarik lagi, karena kondisinya terlihat muram.” Taman seperti Taman Aspirasi dan Taman Sugema dinilai kurang terawat, dengan kursi usang, kotak aspirasi yang hilang, dan kondisi fisik yang menurun. Keberadaan wc umum berbayar juga menjadi keluhan karena dianggap bertentangan dengan prinsip inklusivitas ruang publik, hal tersebut seperti yang dikeluhkan oleh informan 4 “Perlu ada perbaikan maupun pembaruan dari fasilitas taman, namun sepertinya hal itu sulit di lakukan oleh pemerintah, serta kurangnya wc umum, sekaligus ada di lapang merdeka tetapi harus berbayar.” Meskipun demikian, terdapat pula informan yang merasa puas, khususnya terhadap taman seperti Taman Cikondang, di mana fasilitas dinilai cukup memadai dan tidak perlu ditambah apabila tidak dimanfaatkan secara optimal. Selaras dengan ungkapan informan 6 “Saya puas-puas saja, untuk fasilitas khususnya di taman cikondang ini si cukup, karena mau ditambah pun jika tidak digunakan ataupun dimanfaatkan dengan baik untuk apa.”

Kepuasan pengguna taman tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas, tetapi juga oleh kenyamanan dan pengalaman saat berada di taman. Kurangnya pencahayaan, suasana taman yang muram, serta kerusakan fasilitas memberikan kesan negatif dan menurunkan tingkat kunjungan. Beberapa taman bahkan dinilai tidak mencerminkan konsep tematik yang seharusnya menjadi ciri khas dan daya tarik. Ketidaksesuaian antara konsep dan pemanfaatan taman juga mencerminkan lemahnya sosialisasi serta kurangnya kegiatan yang mendukung tema taman. Temuan lainnya menunjukkan bahwa meskipun Kota Sukabumi telah meraih berbagai penghargaan dan pengakuan administratif, kondisi faktual taman di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas tata kelola yang diharapkan. Efektivitas pengelolaan taman tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pembangunan, tetapi juga oleh mekanisme umpan balik yang responsif dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran DPUTR sebagai pengelola teknis dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi serta peningkatan kualitas layanan taman secara konsisten.

Dengan demikian, kepuasan kelompok sasaran terhadap taman tematik di Kota Sukabumi masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat kepuasan yang belum merata menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan taman tidak dapat hanya diukur dari keberadaan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana taman mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan terstruktur, peningkatan kualitas fasilitas dasar, serta penguatan peran taman sebagai ruang publik yang partisipatif, inklusif, dan berdaya guna secara sosial.

4. Daya Tanggap Klien

Menurut teori efektivitas yang dikemukakan oleh (Nakamura dan Smallwood, 1980) pada dimensi daya tanggap klien fokus dasarnya adalah terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dilayani oleh kebijakan dan seberapa tanggap kebijakan tersebut (dan mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkannya) terhadap kebutuhan klien yang dirasakan. Daya tanggap klien merujuk pada sejauh mana pihak pengelola mampu merespons kebutuhan, harapan, dan keluhan masyarakat sebagai pengguna taman tematik. Ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu layanan publik, termasuk taman tematik di Kota Sukabumi. Daya tanggap yang tinggi ditunjukkan melalui kecepatan dan ketepatan pengelola dalam menangani masalah seperti kerusakan fasilitas, kebersihan yang kurang terjaga, atau kebutuhan tambahan seperti pencahayaan dan keamanan.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik, daya tanggap klien mencerminkan keberpihakan pengelola terhadap kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Misalnya, jika masyarakat menyampaikan keluhan mengenai toilet yang tidak tersedia atau taman yang rawan tindakan asusila, dan pihak pengelola langsung menindaklanjuti dengan menyediakan fasilitas atau menambah personel keamanan, maka hal ini menunjukkan bahwa daya tanggap pengelolaan berada dalam kategori baik. Sebaliknya, jika keluhan publik diabaikan atau ditanggapi dengan lambat, akan muncul kesan bahwa pengelolaan taman tidak efektif, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kepuasan dan pemanfaatan taman oleh masyarakat. Respons terhadap keluhan masyarakat serta Saluran komunikasi dan aduan menjadi indikator untuk menilai bagaimana daya tanggap klien terdapat Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Tematik di Kota Sukabumi ini.

Dimensi daya tanggap klien, sebagaimana dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood (1980), menekankan pada seberapa besar suatu kebijakan atau program publik mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai klien atau pengguna layanan. Dalam konteks pengelolaan taman tematik di Kota Sukabumi, daya tanggap klien tercermin dari responsivitas pengelola, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dalam menanggapi keluhan dan masukan masyarakat terhadap berbagai permasalahan taman, seperti kerusakan fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Berdasarkan hasil penelitian, pihak pengelola mengklaim telah memiliki sistem penanganan keluhan yang cukup baik. Informan 1 dan 2 menyampaikan bahwa setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti dengan survei lapangan, dan perbaikan dilakukan jika kerusakan dianggap mendesak serta didukung oleh ketersediaan anggaran. Tindakan cepat ini diupayakan untuk mencegah terjadinya opini negatif di tengah masyarakat dan pemberitaan yang dapat merugikan citra pemerintah. Sebagaimana ungkapan informan 1 “Jika ada keluhan ataupun saran-saran yang masuk kami segera meresponnya. Untuk keluhan itu minimal kami survei terlebih dahulu ke lapangan, perbaikan dilakukan sesuai dengan tingkat keparahan kondisi kerusakan, jika tidak begitu parah tidak akan langsung di perbaiki karena melihat dari segi anggaran juga. Menurut saya PU ini sudah responsif dalam menanggapi keluhan-keluhan yang ada.” dan informan 2 menyatakan hal yang hampir serupa “Dari pihak kami jika ada keluhan tentunya pasti langsung diterima, lalu kita langsung eksekusi melihat keadaannya karena jika keluhan yang masuk tersebut di nanti-nanti takutnya ada media yang ikut menyinggung dan membuat keadaan jadi memburuk. Namun balik lagi, semuanya langsung ditindak lanjuti jika ada anggarannya”.

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna taman belum pernah menyampaikan keluhan, baik secara langsung maupun melalui media digital seperti aplikasi atau website. Sebagian dari mereka tidak mengetahui harus menyampaikan keluhan ke mana dan melalui jalur apa,

selaras dengan ungkapan informan 3 “Saya kurang tahu, karena saya belum pernah mengajukan keluhan dan tidak tahu harus menyampaikan melalui apa.” Sementara sebagian lainnya merasa bahwa pengelolaan taman sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga partisipasi warga dalam bentuk pelaporan dianggap tidak perlu, hal tersebut juga selaras dengan ungkapan informan 6 “Belum pernah, karena ya sudah saja terkait pengelolaan biar mereka sebagai pihak pengelola yang mengelola ini.” Keadaan ini menandakan adanya kesenjangan komunikasi antara pengelola dan masyarakat. Kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pengaduan menyebabkan masyarakat menjadi pasif dalam memberikan masukan, dan hal ini menghambat upaya perbaikan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Lebih lanjut, terdapat pula persepsi dari masyarakat bahwa respons pengelola belum sepenuhnya cepat, terutama dalam menangani kerusakan yang terlihat secara fisik namun dibiarkan dalam waktu cukup lama. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tanggap tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem teknis penanganan keluhan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada warga. Dalam hal ini, transparansi mengenai proses dan waktu tindak lanjut terhadap aduan menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta efektivitas layanan publik.

Terkait saluran komunikasi dan aduan, pihak DPUTR telah menyediakan beberapa kanal resmi, seperti aplikasi *E-SUPER*, *E-Lapor*, dan WhatsApp Ruang Konstruksi. Selain itu, pihak pengelola juga menggunakan *Google Form* untuk mengumpulkan tanggapan pengunjung taman. Sistem ini menunjukkan adanya niat baik dari pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Bahkan, terdapat sistem pemantauan berbasis waktu—dimana aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam 1x24 jam akan mendapat *tag* merah, yang mendorong percepatan respons. Namun, efektivitas saluran ini belum optimal karena sebagian masyarakat tidak mengetahui keberadaan atau cara mengakses kanal-kanal tersebut. Beberapa informan menyampaikan bahwa meskipun mereka yakin pemerintah memiliki *website* atau layanan pengaduan, mereka tidak tahu pasti bagaimana cara menggunakannya. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan sistem belum diimbangi dengan strategi sosialisasi yang baik. Dengan demikian, meskipun pengelola telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang memadai, tantangan utama terletak pada rendahnya pemanfaatan saluran tersebut oleh masyarakat akibat minimnya informasi dan sosialisasi. Hal ini menyebabkan partisipasi publik dalam pengelolaan taman menjadi terbatas, padahal pelibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang responsif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dimensi daya tanggap klien secara nyata, diperlukan penguatan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif, edukatif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Transparansi, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses terhadap kanal pengaduan harus ditingkatkan agar masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta termotivasi untuk terlibat aktif dalam perbaikan dan pemanfaatan taman tematik sebagai ruang publik yang nyaman, aman, dan sesuai kebutuhan mereka.

5. Sistem Pemeliharaan

Menurut teori efektivitas yang dikemukakan oleh (Nakamura dan Smallwood, 1980), sistem pemeliharaan dilakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan kontinyu maka seberapa baiknya suatu program atau hasil akan dapat berhenti bilamana bentuk nyata dari program tersebut selalu memudar. Standar utama dalam pengukuran ini adalah efektivitas kebijakan dalam menyatukan lembaga-lembaga sosial agar sistem politik tetap dapat bertahan sebagai suatu entitas yang stabil.

Sistem pemeliharaan adalah serangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk menjaga agar suatu aset, dalam hal ini taman tematik tetap dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan secara berkelanjutan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah kerusakan, memperpanjang umur fasilitas, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Sistem pemeliharaan merupakan salah satu komponen krusial dalam menunjang efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi. Pemeliharaan tidak hanya mencakup kegiatan membersihkan area taman dan memperbaiki kerusakan, tetapi juga mencerminkan keberlangsungan fungsi taman sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan menarik bagi masyarakat. Sistem ini harus bersifat rutin, terjadwal, dan responsif terhadap kebutuhan aktual di lapangan.

Dalam konteks taman tematik, sistem pemeliharaan yang efektif melibatkan pengawasan kebersihan, perawatan sarana prasarana seperti bangku taman, jalur pejalan kaki, lampu penerangan, serta elemen tematik yang menjadi identitas taman tersebut. Tanpa pemeliharaan yang konsisten, nilai estetika dan fungsional taman akan menurun, yang pada gilirannya mengurangi minat masyarakat untuk memanfaatkannya secara optimal. Beberapa permasalahan yang sering muncul, seperti banyaknya sampah berserakan, taman yang ditumbuhi rumput liar, hingga kerusakan fasilitas bermain, menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan belum berjalan efektif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, minimnya pengawasan, atau ketidakjelasan jadwal dan tanggung jawab petugas lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi sebagai pelaksana teknis telah memiliki sistem pemeliharaan taman yang dilakukan secara rutin. Informan 1 dan 2 menyatakan bahwa “Pemeliharaan taman tematik dilakukan secara berkala dan rutin, jadwal rutinan untuk taman tematik dikarenakan petugasnya sedikit paling balik lagi ketika memang sudah kotor, karena ada 2 petugas (1 untuk membersihkan sampah, 1 untuk memotong tanaman) sedangkan untuk pruning itu dilakukan seminggu 1x. Pengecatan dilakukan 3-6 bulan sekali, perbaikan lampu ketika ada yang mati, penanaman pohon mati (tergantung kerusakan). Pembersihan sampah setiap hari itupun biasanya ada warga yang membantu, jam operasional pembersihan taman tematik itu dari jam 08.00-14.00 WIB.” Namun demikian, efektivitas sistem pemeliharaan yang telah dirancang belum sepenuhnya terlihat optimal di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat taman yang kurang terawat, seperti Taman Sugema dan Taman Aspirasi. Pada taman-taman ini, ditemukan kondisi seperti rumput liar yang tidak dipangkas, dedaunan berserakan, fasilitas seperti bangku dan kotak saran yang rusak atau hilang, serta pencahayaan yang tidak memadai. Selaras dengan ungkapan dari informan 7 “Dari yang saya lihat taman tematik di Kota Sukabumi masih perlu perawatan khusus, pemeliharaan yang terjadwal karena sejauh ini saya juga belum pernah melihat keterlibatan masyarakat dalam proses pemeliharaan taman. Kurangnya petugas kebersihan atau keamanan dan juga pemeliharaan yang menyebabkan rusaknya fasilitas dan penyalahgunaan area menjadi faktor tantangan bagi efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik.” Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi sistem pemeliharaan, baik dari segi frekuensi, kualitas pelaksanaan, maupun pengawasan hasil kerja petugas di lapangan.

Lebih lanjut, sistem pemeliharaan yang baik seharusnya juga disertai dengan pelaporan berkala, evaluasi kondisi taman, dan tindak lanjut yang cepat terhadap kerusakan. Informasi dari pihak pelaksana menyebutkan bahwa pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 1x24 jam melalui sistem *e-reporting*, namun faktanya sebagian masyarakat masih mengeluhkan lambatnya penanganan terhadap

kerusakan ringan yang tampak di taman. Hal ini menandakan bahwa sistem yang sudah ada belum sepenuhnya berjalan secara responsif dan belum diketahui luas oleh masyarakat. Kekurangan lain dalam sistem pemeliharaan taman tematik adalah belum adanya integrasi yang kuat antara sistem pemeliharaan rutin dengan sistem pemantauan berbasis partisipasi masyarakat. Padahal, pelibatan warga sebagai pengguna taman sangat penting untuk mendeteksi dini kerusakan atau ketidaksesuaian fungsi taman. Minimnya partisipasi ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi tentang saluran pengaduan dan belum ada edukasi masyarakat mengenai peran mereka dalam menjaga keberlanjutan taman.

Dengan demikian, meskipun secara struktural pelaksana telah membangun sistem pemeliharaan untuk mendukung keberlangsungan taman tematik, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan teknis, pengawasan, dan komunikasi publik. Keberadaan sistem belum diimbangi dengan efektivitas implementasi dan pemanfaatan teknologi pelaporan serta penguatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan taman, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem pemeliharaan yang berjalan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memperluas sosialisasi dan literasi publik mengenai pentingnya menjaga dan melaporkan kondisi taman secara aktif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan taman tematik di Kota Sukabumi belum tercapai secara optimal. Pencapaian tujuan taman sebagai ruang publik masih terhambat oleh pemanfaatan yang tidak sesuai dengan konsep tematik, serta belum terpenuhinya fungsi sosial dan ekologis sebagaimana yang diharapkan. Dari sisi efisiensi, pengelolaan taman mengalami hambatan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang berdampak pada rendahnya kualitas perawatan dan layanan fasilitas. Hal ini tampak dari beberapa taman yang kurang terawat dan hanya mendapatkan pemeliharaan rutin yang minim. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap taman juga beragam; meskipun ada yang merasa cukup puas, banyak pengguna taman yang mengeluhkan kerusakan fasilitas, kebersihan, dan keamanan. Lebih lanjut, daya tanggap pemerintah daerah, khususnya DPUTR, terhadap keluhan masyarakat masih dinilai belum cukup responsif. Meskipun sistem pengaduan telah tersedia, implementasinya di lapangan tidak berjalan maksimal karena perbaikan sering kali tertunda. Selain itu, kurangnya forum komunikasi antara masyarakat dan pengelola membuat aspirasi publik sulit tersampaikan secara efektif. Sistem pemeliharaan taman pun belum berjalan secara optimal, karena jumlah dan distribusi SDM yang tidak sebanding dengan jumlah taman yang ada. Ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan tidak adanya petugas tetap di beberapa taman menyebabkan efektivitas pengelolaan taman menjadi kurang maksimal. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan, baik dari aspek kelembagaan, teknis operasional, maupun partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

- Hertati, D. (2020). *Buku Monograf Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya*. CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Malawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Maryani, E., Safari, A., Riyanti, A., & Mulyana, H. (2023). Thematic Park as Recreational Area: Residents preferences. *Jurnal Geografi Gea*, 23(2), 159–172.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data analysis*. America: Sage Publications.
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin's Press.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, & Syafruddin. (2023). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ristianti, I., Ardianto, D., Rahmawati, I. D., & Marfai, M. A. (2024). Using Biophilic Design to Enhance Resilience of Urban Parks in Semarang City, Indonesia. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan Binaan*, 8(1), 1–15.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subakti, H., Hurit, R. U., & Eni, G. D. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyanto, E., & Sitohang, C. A. V. (2017). Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Populis*, 2(3), 45–56.
- Sadli, R., Sukmawati, A. M., & Kunci, K. (2021). Planning and Culture (SPACE): Studi Pemanfaatan Taman Berlabuh di Tarakan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(1), 11–20.
- Sofie, A., Salshabila, F., & Sukmawati, A. M. (n.d.). Efektivitas Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Pendukung Aktivitas Ruang Publik (Studi Kasus: Taman Kota Gajahwong, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta). *Jurnal Planologi*, 4(2), 88–99.
- Syahrial, I., Amirulloh, M. R., & Purwanti, D. (2023). Evaluasi Kebijakan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota SUKABUMI (Studi Kasus di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 416–438.
- Pradityo, N. E., Yuningsih, Y., & Yunita, D. (2021). Efektivitas Program Taman Tematik Sebagai Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Pada Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 1–12.
- Yuwono, F., Mansyur, U., & Djakapermana, R. D. (2023). Strategi Pencapaian 20% RTH Publik Kota Sukabumi. *Jurnal Teknik*, 24(2), 8–14.
- Wijaya, J. S., & Dwisusanto, Y. B. (2021). Taman Tematik dan Pengaruhnya Terhadap Setting Fisik Dan Penggunaan Taman di Kota Bandung. *Jurnal RISA (Riset Arsitektur)*, 5(3), 302–319.